



Judul : RUU Pengadaan Barang Dan Jasa  
Tanggal : Sabtu, 09 September 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 6

## RUU Pengadaan Barang Dan Jasa

# Senayan Tunggu Surat Presiden

**ANGGOTA** Komisi XI DPR Puteri Anetta mendukung upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyegerakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa.

Kehadiran RUU ini sangat dinanti untuk memastikan belanja pengadaan di Pemerintah memprioritaskan produk dalam negeri.

“Kenapa disegerakan? Karena payung hukum yang ada sekarang hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres) saja. Itu sebenarnya sangat disayangkan, karena belum ada peraturan yang mengikat di level undang-undang,” kata Puteri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Puteri bilang, RUU Pengadaan Barang dan Jasa ini akan memperkuat dan memberikan kepastian hukum yang komprehensif dalam pengadaan barang. Belanja Pemerintah diharapkan memprioritaskan produk dalam negeri, digitalisasi pengadaan, sampai dengan konsolidasi belanja.

Karena RUU ini adalah usul Pemerintah, pihaknya berharap, Surat Presiden (Surpres) bisa segera disampaikan kepada DPR untuk ditembuskan ke Komisi XI DPR. “Kami harapkan RUU ini bisa selesai sebelum akhir tahun ini,” katanya.

Puteri juga mendukung LKPP yang sudah berupaya keras mendorong belanja dari produk dalam negeri, pada setiap pengadaan Pemerintah,

baik pusat, daerah, hingga kementerian/lembaga.

Buktinya, LKPP telah membuka lebih dari 27 ribu produk di dalam katalog belanja Pemerintah, sebagai kebijakan afirmasi untuk produk dalam negeri, anomali produk, sampai anomali harga.

“Ini upaya yang sangat bagus, senantiasa kita lakukan supaya produk yang mencurigakan dan rentang diselewengkan senantiasa dalam pengawasan LKPP. Dan tentunya, kita mendukung usulan penambahan Rp 50 miliar untuk anggaran LKPP Tahun 2024,” ujarnya.

Sementara, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengakui, dalam beberapa aspek, pihaknya masih memiliki kelemahan. Pihaknya terus turun ke bawah dalam memantau dan sosialisasi terkait aturan pengadaan barang dan jasa. Sebab, di daerah belum maksimal memaknai peraturan terkait pengadaan barang dan jasa ini.

“Karena itu, dalam anggaran tahun 2024, kita sudah rencanakan ada program untuk pengadaan barang dan jasa Rp 55,25 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 138,21 miliar,” ujarnya.

Pihaknya tengah mengupayakan agar RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa sedapat mungkin sudah bisa dibahas bersama Komisi XI DPR di tahun ini. Dan ditargetkan, paling lambat Desember nanti sudah bisa disahkan sebagai produk undang-undang. ■ KAL